

Sub-lanskap 4 dengan ekosistem gambut yang terestorasi, tahan bencana dan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat

Rencana Pengelolaan Sublanskap Muara Medak–Mendis Jaya

Amiril, Andri Abbas, Lia karlina sinamo, Jolinatalius Aritonang,
Januardi Masrullah, Machmudi, Ingriyani



Sub-lanskap 4 dengan ekosistem gambut yang terestorasi, tahan bencana dan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat

Rencana Pengelolaan Sublanskap Muara Medak–Mendis Jaya

Tim Penulis

(Kelompok Kerja Bentang Lahan)

Amiril, Andri Abbas, Lia Karlina sinamo, Jolinatalius
Aritonang, Januardi Masrullah, Machmudi, Ingriyani

Tim Teknis

(ICRAF Indonesia)

Seruni Fauzia Lestari, Ira Ratna Sari, Arif Budi
Nugraha, Cecilia Novia, Dewi Kiswani Bodro,
Nurhayatun Nafsiyah, Thifali Adzani, Rendra Bayu
Prasetyo, Anugerah Yuliadi, Yoga Lorensa Putra,
Era Irhamni, Agrian Maulana, Yesi Lismawati,
Syamsul Asinar, Asep Suryadi, Feri Johana,
Ni'matul Khasanah, Suyanto, Andree Ekadinata,
Sonya Dewi

Tim Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan

Pijar Riza Anugerah
Riky Mulya Hilmansyah

Amiril, Abbas A, Sinamo LK, Aritonang J, Masrullah J, Machmudi, Ingriyani. 2026. Sub-lanskap 4 dengan ekosistem gambut yang terestorasi, tahan bencana dan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Bogor, Indonesia: World Agroforestry (ICRAF).

© 2026 World Agroforestry (ICRAF)

Publikasi ini dapat direproduksi untuk tujuan non-komersial sepanjang tidak mengubah isi, dengan kewajiban mencantumkan sumber sesuai kaidah yang berlaku.

Informasi disusun seakurat mungkin berdasarkan pengetahuan saat diterbitkan; namun penerbit tidak memberikan jaminan apa pun dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dari penggunaannya.

CIFOR–ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 ; Fax: +(62) 251 8625416
Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

Tata Letak: Muhammad Azizy

2026

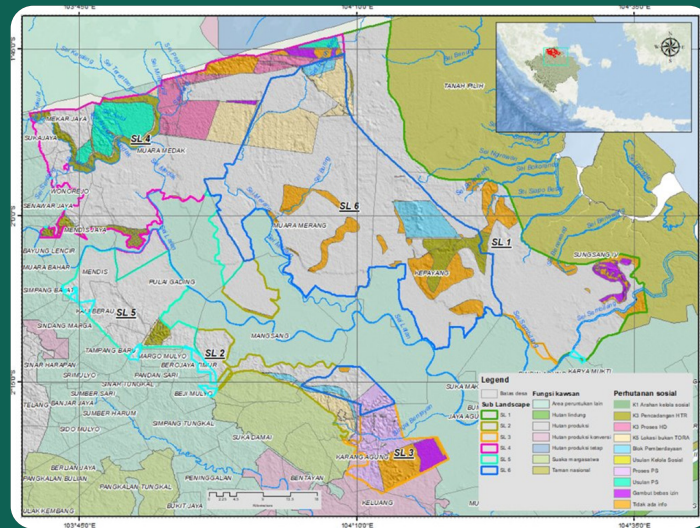
Daftar Isi

- 1 Gambaran Umum
- 2 Isu Strategis Sublanskap Muara Medak–Mendis Jaya
- 3 Strategi Pengelolaan dan Capaian Dambaan
- 4 Peta Intervensi: Rekomendasi Spasial Intervensi Kegiatan
- 5 Keterkaitan SL dan Resor KPH (Rekomendasi Sinergi dan Integrasi)
- 6 Rekomendasi Aktivitas Pada Setiap Strategi
- 9 Model Usaha: Restorasi ekosistem gambut dan kehati melalui pengendalian karhutla dan agroforestri
- 11 Kesimpulan



Gambaran Umum

- Sublanskap Muara Medak-Mendis Jaya mencakup 6 desa di Kecamatan Bayung Lencir dengan area seluas 78,442 hektare
- Sublanskap Muara Medak-Mendis Jaya masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi yang berbatasan langsung dengan APL di Provinsi Jambi.
- Terdapat gambut yang masuk dalam karakteristik gambut dalam dan ekosistem gambut fungsi lindung (seluas 29.774,47 hektar). Di wilayah ini sering terjadi kebakaran lahan dan memiliki kerentanan bencana yang tinggi.
- Memiliki potensi areal perhutanan sosial yang luas untuk dikembangkan, dengan beberapa komoditas seperti pupuk organik, madu dan beragam jasa lingkungan.
- Sublanskap ini memiliki area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi dan beberapa satwa yang dilindungi seperti harimau.



© World Agroforestry (ICRAF)

Isu Strategis Sublanskap Muara Medak–Mendis Jaya

1. Degradasi ekosistem gambut dan risiko bencana tinggi
Meningkatnya kejadian cuaca ekstrem yang diperparah dengan pengelolaan lahan gambut yang belum optimal mengakibatkan daerah ini sering mengalami resiko bencana seperti kebakaran hutan dan lahan. Kondisi gambut lindung di sublanskap ini terus mengalami degradasi seiring dengan pembukaan dan pemanfaatan lahan untuk budidaya perkebunan, pengerangan hutan rawa dan pembangunan sekat kanal yang belum optimal serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan hutan.

2. Tekanan penggunaan lahan dan konflik pemanfaatan ruang
Sublanskap Muara Medak–Mendis Jaya mencakup jumlah orang dan areal peruntukan perhutanan sosial yang paling luas diantara sublanskap lainnya. Tekanan penggunaan lahan terjadi dalam upaya mengakomodasi akses lahan untuk masyarakat lokal namun ditemukan konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat di luar Provinsi Sumatera Selatan.

3. Penguatan tata kelola hutan berbasis masyarakat
Dalam upaya meningkatkan akses lahan masyarakat lokal melalui Perhutanan Sosial, penguatan tata kelola hutan berbasis masyarakat diperlukan untuk mendampingi akses lahan untuk masyarakat local kawasan, terutama pada lahan yang sudah ditanami kelapa sawit. Terlebih lagi, bagi kelompok usaha perhutanan social yang sudah ada perlu dikuatkan untuk semakin mengembangkan opsi penghidupan masyarakat dan meningkatkan ketahanan iklim.



Visi

Sub-Lanskap Muara Medak–Mendis Jaya dengan ekosistem gambut yang terestorasi, tahan bencana dan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.

Strategi Pengelolaan dan Capaian Dambaan



Strategi-1

Perlindungan hutan dan kehati

Dalam 10 tahun, area kawasan hutan yang terdegradasi berkurang 25% dan seluruh koridor satwa terlindungi.

Konservasi

Restorasi bentang lahan



Strategi-2

Pengembangan multiusaha kehutanan melalui silvopastura dan agroforestri

Pada tahun 2035, pendapatan masyarakat pada area di dalam dan sekitar kawasan hutan dapat meningkat sebesar 25% dari pengembangan silvopastura dan agroforestri.

Pemanfaatan berkelanjutan



Strategi-3

Mendorong perhutanan sosial melalui peningkatan akses lahan serta penguatan tata kelola perhutanan sosial

Pesetujuan Pengelolaan PS meningkat 25% dari PIAPS dan peningkatan kelas KUPS.

Pemanfaatan berkelanjutan



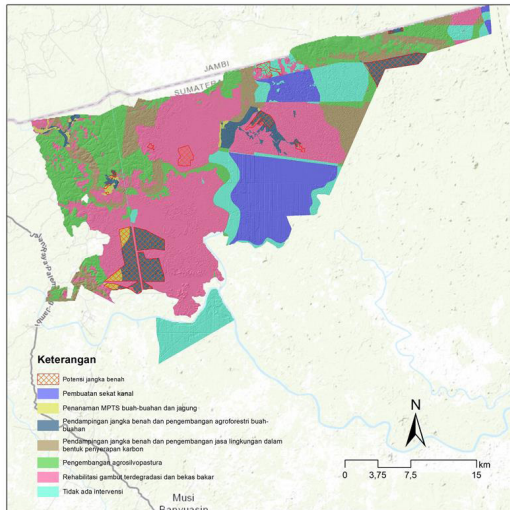
Strategi-4

Penguatan pengelolaan jangka benah

Tanaman sawit dalam kawasan hutan menurun 25% dan meningkatnya tanaman kehutanan atau MPTS.

Restorasi bentang lahan

Peta Intervensi: Rekomendasi Spasial Intervensi Kegiatan

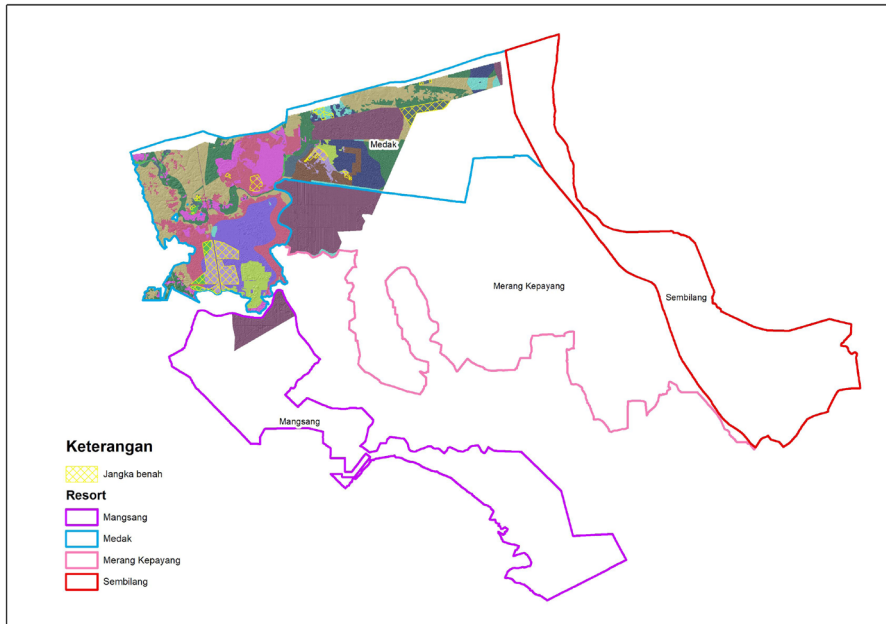


Peta intervensi adalah representasi spasial dari strategi pengelolaan lanskap yang menunjukkan lokasi spesifik di mana intervensi tertentu akan diterapkan. Peta ini disusun berdasarkan unit dan penentuan lokasi kegiatan intervensi. Dengan menggunakan peta intervensi, keputusan-leputusan pengelolaan yang spesifik dapat dibuat secara lebih akurat, dengan memastikan bahwa setiap tindakan selaras dengan kondisi kebutuhan spesifik tiap wilayah.

Keempat strategi Sublanskap Muara Medak-Mendis Jaya telah dipetakan pada unit perencanaan yang ada. Daerah dengan luasan areal terbesar adalah area untuk rehabilitasi gambut degradasi dan bekas bakar. Strategi ini berada pada luas 29.539 ha atau 37.65% dari total luasan Sublanskap Muara Medak-Mendis Jaya. Selain intervensi tersebut, pengembangan agrosilvopastura juga memiliki areal yang cukup dominan yaitu 14.432 ha atau mencapai 18.4 % dari total luas Sublanskap Muara Medak-Mendis Jaya.



Keterkaitan SL dan Resor KPH (Rekomendasi Sinergi dan Integrasi)



Luas SL 4 terhadap resor KPH

Mangsang	2,984.04
Medak	64,961.86
Merang Kepayang	10,445.02
Sembilang	0
Tidak ada data	51.38

Proporsi luas terhadap SL 4 serta wilayah yang memiliki potensi untuk dilakukan intervensi jangka benah.

Rekomendasi Aktivitas Pada Setiap Strategi

Strategi 1– Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab	Tagging RPHJP
1	Perlindungan hutan dan kehati	Dalam 10 tahun, area kawasan hutan yang terdegradasi berkurang 25% dan seluruh koridor satwa terlindungi			
1.1	Rehabilitasi areal gambut yang terdegradasi dan area bekas bakar	Terciptanya kebun percontohan terintegrasi	1 kebun percontohan/5 tahun	KPH, Dinas Kehutanan	Facilitasi Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi pada KPH
1.1.1	Pengayaan jenis tanaman asli untuk mengembangkan jasa lingkungan dalam bentuk penyerapan karbon	1. Luas area penanaman 2. Jumlah jenis tanaman asli	1 kelompok masyarakat menerima pendampingan minimal 1 kali/tahun	1. KPH 2. Pemerintah Desa	Facilitasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Mitigasi Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
1.1.2	Pembuatan sekat kanal	Jumlah sekat kanal	Meningkat per tahun	Dinas LH, Dinas Kehutanan	
1.2	Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan ekosistem gambut			KPH, Dinas LH	Facilitasi Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi pada KPH
1.2.1	Penguatan tata kelola dan sarpras	1. Jumlah KMPA yang terbentuk 2. Persentase KMPA aktif	1. Meningkatkan per tahun 2. Meningkatkan 5% per tahun	1. KPH 2. Pemerintah Desa	
1.2.2	Pendampingan pengajuan pembiayaan inovatif dalam upaya pelestarian (rehabilitasi dan restorasi)	Jumlah pelatihan	2 kali per tahun	KPH	

Strategi 2–Pengembangan multisaha kehutanan melalui silvopastura dan agroforestri

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab	Tagging RPHJP
2	Pengembangan multisaha kehutanan melalui silvopastura dan agroforestri	Pada tahun 2035, pendapatan masyarakat pada area di dalam dan sekitar kawasan hutan dapat meningkat sebesar 25% dari pengembangan silvopastura dan agroforestri			
2.1	Penguatan rantai pasok pupuk organik (perusahaan, warga sekitar)	Terciptanya kebun percontohan terintegrasi	1 kebun percontohan/5 tahun	Pemerintah desa, KTH, KPS, KUPS	Pertumbuhan Investasi, Pengembangan Industri, Promosi Produk Hasil Hutan dan Pasar untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional
2.1.1	Penguatan BUMDEs dan koperasi merah putih	Jumlah BUMDes aktif	Meningkat per tahun	Pemerintah Desa	
2.1.2	Penguatan tata kelola pupuk organik	1. Jumlah produksi 2. Penjualan	1. Meningkatkan 2,5% per tahun 2. Meningkatkan 5% per tahun	KTH, KPS, KUPS	
2.2	Pengembangan kebun belajar	1. Jumlah kebun 2. Luas kebun 3. Jumlah peserta kebun	1. Meningkatkan per tahun 2. Meningkatkan per tahun 3. Meningkatkan per tahun	KTH, KPS, KUPS	
2.2.1	Pengembangan pestisida nabati dan pupuk cair	1. Jumlah produksi 2. Jumlah bahan baku	1. Meningkatkan per tahun 2. Meningkatkan per tahun	KTH, KPS, KUPS	
2.2.2	Pengembangan tanaman obat (produksi hingga pasca panen)	1. Luas area penanaman 2. Jumlah produksi 3. Jenis tanaman obat yang ditanam 4. Produk turunan	1. Meningkatkan 2% per tahun 2. Meningkatkan 5% per tahun 3. Bertambah tiap tahun 4. Bertambah ragamnya tiap tahun	KTH, KPS, KUPS	

Strategi 3–Penguatan Kapasitas Hak Akses di Kawasan Hutan

Strategi 4–Penguatan Pengelolaan Jangka Benah

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab	Tagging RPHJP
3	Mendorong perhutanan sosial melalui peningkatan akses lahan serta penguatan tata kelola perhutanan sosial	Pesetujuan Pengelolaan PS meningkat 25% dari PIAPS dan peningkatan kelas KUPS			
3.1	Fasilitasi usulan PS baru	1. Jumlah luas area PS 2. Jumlah KPS	1. Meningkatkan per tahun 2. Meningkatkan per tahun	KPH, Dinas Kehutanan, BPS	Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Kegiatan Perhutanan Sosial
3.1.1	Mendorong legalitas KUPS perempuan	Jumlah KUPS perempuan	Meningkat tiap tahun	KPH, Dinas Kehutanan, BPS	
3.1.2	Penguatan ketahanan pangan di area PS melalui penanaman tanaman pangan di kebun dapur	Luas kebun dapur pada area PS	Meningkat 2,5% per 5 tahun	KPH, Dinas Kehutanan, BPS	
3.1.3	Pengembangan agroforestri buah-buahan berbasis perhutanan sosial	Luas area agroforestri buah-buahan di area PS	Meningkat 10% per 5 tahun	KTH,KPS,KUPS	
3.2	Pembenahan tata kelola perizinan PS	Pelaksanaan verifikasi	Terlaksananya verifikasi per tahun	KPH, Dinas Kehutanan, BPS	Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Kegiatan Perhutanan Sosial
3.2.1	Akses pendanaan inovatif/insentif	1.Jumlah pendanaan yang diakses 2.jumlah KPS/KUPS penerima manfaat	1. Meningkatkan tiap tahun 2. Meningkatkan tiap tahun	KPH	
3.2.2	Peningkatan kapasitas kelembagaan perhutanan sosial	1. Jumlah pelatihan 2. Dokumen peraturan KTH (AD/ART)	1. 3 pelatihan per tahun 2. Meningkatkan jumlah KTH yang memiliki AD/ART	KPH, BPS	
3.2.3	Desain model bisnis yang menguntungkan	Jumlah KUPS yang memiliki model bisnis	Meningkat tiap tahun	KPH, Dinas Kehutanan, BPS	
4	Penguatan pengelolaan jangka benah	Tanaman sawit dalam kawasan hutan menurun 25% dan meningkatnya tanaman kehutanan atau MPTS			
4.1	Pendampingan persiapan penerapan jangka benah	1. Jumlah KPS 2. Luas area jangka benah	1 kebun percontohan/5 tahun	KPH, Dinas Kehutanan, BPS	Implementasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.1.1	Monitoring dan evaluasi izin perhutanan sosial dan area sawit	Jumlah KPS yang dimonitoring dan evaluasi	100% KPS	KPH, Dinas Kehutanan, BPS	
4.2	Mendorong multiusaha kehutanan dan pengembangan HHBK	1. Jumlah usaha yang berjalan 2. Jumlah jenis komoditas	1. Meningkatkan tiap tahun 2. Meningkatkan tiap tahun	KTH, KPS, KUPS	
4.2.1	Penerapan agroforestri dan agrosilvofishery melalui demosite	1. Jumlah demosite 2. Luas area penerapan	1. Meningkatkan tiap tahun 2. Meningkatkan 2,5% per tahun	KTH, KPS, KUPS	



Model Usaha: Restorasi ekosistem gambut dan kehati melalui pengendalian karhutla dan agroforestri

Merupakan suatu usulan model usaha yang dapat dijadikan sebagai sarana Kerjasama pada Tingkat SL dalam pengelolaan Perhutanan Sosial, dengan kerangka sebagai berikut:

- **Tujuan model (Muara Medak–Mendis Jaya):** bisnis komoditas dibangun berbasis perlindungan hutan & kehati + restorasi gambut (sekat kanal, patroli gabungan multipihak, penguatan KMPA) agar produksi stabil, risiko kebakaran turun, dan akses pasar lebih kuat.
- **Sistem produksi (Masyarakat Perhutanan Sosial melalui KUPS/KTH/KWT, didampingi KPH):** agroforestri multi-strata dengan **strata atas** (karet, tanaman lokal, petai/pohon buah, jeruk siam), **strata tengah** (kopi liberika), **strata bawah** (nanas), termasuk rehabilitasi & pengayaan tanaman.
- **Produk utama yang dijual (dan nilai tambah):** (1) getah karet, (2) greenbean kopi & olahan, (3) hasil panen buah, (4) nanas segar & olahan—dengan fokus mutu, sortasi/grading, dan pengolahan kemasan sederhana.
- **Rantai pasok & kanal pasar:**
 1. Karet → (skema lelang) pengepul/supplier BOKAR → pabrik/eksportir
 2. Kopi/olahannya → BUMDes/Koperasi → pasar lokal + retailer modern/ marketplace
 3. Buah & nanas → pengepul/BUMDes/ Koperasi → pasar lokal + retailer modern + perusahaan sekitar hutan
- Peran pemangku kepentingan (yang harus dikerjakan): KPH memastikan arahan & kepatuhan pengelolaan; KUPS/KTH/KWT mengelola operasional (agregasi, mutu, logistik, pencatatan, negosiasi kontrak, lelang karet); BUMDes/ Koperasi menyiapkan layanan bisnis (modal kerja, gudang, olah/kemas, pemasaran); mitra hilir (pabrik/retail/perusahaan sekitar) menjadi offtaker dengan standar mutu dan skema serapan/pembayaran yang jelas.

Faktor Pemungkin

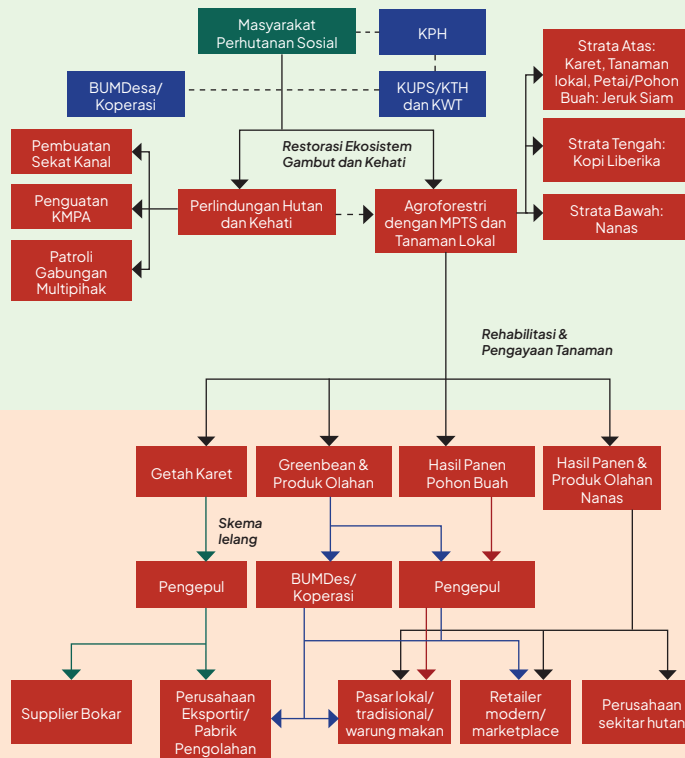
Proses Produksi

- Regulasi Perhutanan Sosial
- Aspek Legal dan Kelembagaan
- Pedoman GAP & SNI budidaya & panen
- Regulasi RHL Gambut dan KTA
- Legalitas KUPS & BUMDesa
- Regulasi terkait pengelolaan jangka benah
- Regulasi terkait pengaturan tata air gambut
- Program Pendampingan KPH & Pemda
- Perizinan produk olahan pangan
- Konsep kesetaraan gender
- Program CSR

Pemasaran

- Label halal dan sertifikasi P-IRT
- Sertifikasi produk usaha berkelanjutan (FSC)
- IUPHHBK atau PBPH Multi Usaha
- Provisi Sumber Daya Hutan
- Program kredit usaha mikro
- Peraturan merek dan pengemasan
- Regulasi ekspor dan impor perdagangan dan perpajakan
- SNI penanganan pasca panen, pengolahan dan standar kualitas produk
- Prinsip kesetaraan gender

Kegiatan Usaha Inti



Faktor Pendukung

- Input pertanian
- Input peralatan
- Bantuan bibit HHHBK unggul dan tanaman lokal
- Tenaga penyuluh kehutanan
- Penguatan kapasitas: pelatihan, pendampingan
- Pengetahuan dan sumber informasi
- Teknologi tepat guna yang terjangkau
- Infrastruktur pendukung
- Sumber pembiayaan
- Polhut, TNI

- Penguatan kapasitas (pelatihan dan pendampingan) pengelolaan bisnis, pemasaran
- Gudang
- Pelabelan & pengemasan
- Teknologi informasi
- Saluran distribusi
- Informasi harga & akses pasar
- Sumber pembiayaan
- Alat pasca panen dan olahan pangan

Institusi Pendukung

- Masyarakat Perhutanan sosial
- Pemda dan Pemdes
- Kementerian Kehutanan
- KUPS, KTH, KWT
- Dinas TPHP
- Dinas Kehutanan/KPH
- DLH
- Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak
- BPBD, Polhut, TNI
- NGOs, Lembaga riset, universitas
- Sektor swasta/perusahaan
- Dinas PUPR

- Pemerintah desa
- Lembaga pembiayaan
- BUMDesa/Koperasi merah putih
- Dinas TPHP
- Dinas kesehatan
- Diskoperindag UMKM
- NGOs, Lembaga riset, universitas
- Koperasi (merah putih)
- Perusahaan Swasta



Kesimpulan

1. Rencana pengelolaan Sublanskap Muara Medak-Mendis Jaya merupakan suatu instrumen untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bijaksana. Rencana pengelolaan lanskap ini mengarahkan alokasi ruang di Sublanskap Muara Muara Medak-Mendis Jaya sesuai dengan visi bersama yang telah disepakati, yaitu sublanskap yang terlindungi, produktif, dan berkelanjutan melalui tata kelola kehutanan yang efektif, kolaboratif dan inovatif dengan menawarkan beragam pendekatan untuk meningkatkan ketahanan lanskap dengan **solusi berbasis alam**.
2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lanskap merupakan upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan di lanskap Kahu. Rencana ini merupakan hasil dari proses diskusi yang dihadiri dan disepakati bersama oleh perwakilan dari UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis, HAKI, Gapoktan Mandiri Jaya, Pemerintah Desa Mendis Jaya, perwakilan petani Muara Medak dan Mendis Jaya.
3. Menuju pencapaian visi pengelolaan Sublanskap Muara Medak-Mendis Jaya, proses kolaboratif penyusunan Rencana Pengelolaan Lanskap menghasilkan 4 strategi utama, yaitu: 1) **Perlindungan Hutan dan Kehati**, 2) **Pengembangan multiusaha kehutanan melalui silvopastura dan agroforestri**, 3) **Mendorong perhutanan sosial melalui peningkatan akses lahan serta penguatan tata kelola perhutanan sosial**, dan 4) **Penguatan pengelolaan jangka benah**.
4. Setiap strategi pengelolaan Sublanskap Muara Medak-Mendis Jaya memiliki serangkaian indikator, target, dan pemangku kepentingan penanggungjawab sebagai wujud pemantauan dan evaluasi secara partisipatif. Sebagai ilustrasi, pendapatan masyarakat pada area di dalam dan sekitar kawasan hutan dapat meningkat sebesar 25% dari pengembangan silvopastura dan agroforestri dalam kurun waktu 10 tahun.
5. Sublanskap Muara Medak-Mendis Jaya memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pengelolaan hutan berkelanjutan.
6. Keberhasilan implementasi strategi-strategi pada Rencana Pengelolaan Sublanskap Muara Medak-Mendis Jaya sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari **pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor swasta, termasuk perbankan**. Selain itu, upaya mengintegrasikan rencana ini ke dalam kebijakan pengelolaan yang lebih luas, seperti dokumen RPHJP, RPHJPD, RPJPD, RPJMD dan rencana sektoral lainnya, menjadi langkah yang krusial. Terakhir, kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan juga berperan penting dalam meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan alternatif, guna mewujudkan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan.



In partnership with
Canada



#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang | Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia

Tel: +(62) 251 8625 415 | Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org

www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

